

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. Dalam kondisi normal, pemutusan hubungan kerja akan menghasilkan sesuatu keadaan yang sangat membahagiakan. Setelah menjalankan tugas dan melakukan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan, dan pengabdian kepada organisasi maka tiba saatnya seseorang untuk memperoleh penghargaan yang tinggi atas jerih payah dan usahanya tersebut.<sup>1</sup>

PHK sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi tidak normal nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Dunia industri negara maju yang masih saja mencari upah buruh yang murah, senantiasa berusaha menempatkan investasinya di negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang besar, walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan pabriknya ke Negara lain. Keadaan ini tentu saja berdampak PHK pada karyawan di negara yang ditinggalkan. Efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan pada dewasa ini, merupakan jawaban atas penambahan posisi-posisi yang tidak perlu di masa lalu, sehingga dilihat secara struktur organisasi, maka terjadi penggelembungan yang sangat besar. Ketika tuntutan efisiensi harus dipenuhi, maka restrukturisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja terjadi

---

<sup>1</sup> Mahran Yahdiani [https://www.academia.edu/.Makalah PHK Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.academia.edu/.Makalah_PHK_Pemutusan_Hubungan_Kerja) diakses tanggal 27 Juni 2019 Pukul 19.39 WIB

pemangkasan posisi besar-besaran, sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan. Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan). Untuk bisa mendapatkan biaya tersebut setiap orang harus mencari dan melakukan pekerjaan. Bekerja dapat dilakukan secara sendiri maupun bekerja pada orang lain. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan, tentunya terdapat hubungan kerja antara pekerja dan pengusahanya, dimana hubungan kerja tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja tersebut memuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pekerja dan pengusahanya seperti pendapatan upah/ gaji dan keselamatan kerja.<sup>2</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu hal dalam dunia ketenagakerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja / buruh yang masih aktif bekerja. Untuk masalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi sebab berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusahanya karena antara pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing – masing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan tersebut. Berbeda halnya dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara sepihak yaitu oleh pihak pengusahanya. Harapan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup telah pupus begitu saja lantaran terjadinya PHK yang tidak disangka – sangka oleh para pekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi

---

<sup>2</sup> Mahran Yahdiani <https://www.academia.edu//.> Makalah PHK Pemutusan Hubungan Kerja diakses tanggal 27 Juni 2019 Pukul 19.40 WIB

perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Namun, mau tidak mau para pekerja / buruh harus menerima kenyataan bahwa mereka harus menjalani PHK.<sup>3</sup>

Dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak - pihak yang bersangkutan yaitu pengusaha dan pekerja / buruh harus benar – benar mengetahui hal - hal yang berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja / buruh, agar mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK hal ini sudah tercatat dalam pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :

- a) pekerja meninggal dunia
- b) jangka waktu kontak kerja telah berakhir
- c) adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Yang dimana pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan judul perlindungan hukum pekerja kontrak yang di PHK

---

<sup>3</sup> Putri Melinda. <https://gajimu.com/pekerjaan-yang-layak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja/alasan-alasan-phk> diakses tanggal 27 Juni 2019 Pukul 19.44 WIB

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Pemutusan Hubungan Kerja Kontrak, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt575e613f7740b/pemutusan-hubungan-kerja-pada-cv/> diakses tanggal 27Juni2019 Pukul 19.49WIB

dalam masa kontrak kerja yang masih aktif dalam putusan nomor : 137 K/Pdt.sus/2012

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah dalam Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak kerja yang masih aktif dalam putusan nomor : 137 K/Pdt.sus/2012”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan hubungan industrial nomoer : 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gto ?
2. Apa saja Hak-hak para pekerja kontrak yang di PHK ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak yang masih aktif.
2. Untuk mengetahui hak-hak pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak kerja yang masih aktif

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan konstribusi pemikiran atau wawasan yang luas bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya, sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dari hasil penelitian ini terutama pihak yang di rugikan oleh perusahaan.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memastikan upaya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak kerja yang masih aktif.
2. Mengetahui hak-hak pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak kerja yang masih aktif.

## **F. METODE PENULISAN**

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia *ontology* dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein*. Sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan metodologi dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapat secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastiaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas fungsi hakim di Indonesia beserta mengupas antinomy antara norma hukum dan nilai keadilan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa pengaturan perundang-undangan.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca dan memahami serta mengumpulkan berbagai literatur.

## **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisa dengan menggabungkan antara literatur dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan.

## **G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yakni: Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak kerja yang aktif dan apa saja hak-hak pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak kerja yang masih aktif.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara isi, mengkaji dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa.